

ANALISIS KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN: STUDI LITERATUR TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Legi Likasri Simbolon¹, Nazwa Aulia²,

Olive Katrina Joyanka Sihombing³, Samuel Revaldo Jeverson Siboro⁴, Ruben Boot⁵

Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universita Negeri Medan, Sumatera Utara

Email:egisimbalono5@gmail.com¹,nazwaaau2006@gmail.com²,samuelsiboro91@gmail.com³,olivehombing123@gmail.com⁴, rubenbasin@gmail.com⁵

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial (Bansos) bertujuan memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, pelaksanaannya di Kota Medan masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ketidaktepatan penyaluran Bansos dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan berita resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran terutama disebabkan oleh ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lemahnya verifikasi faktual di tingkat kelurahan, rendahnya transparansi publik, serta adanya pengaruh kepentingan sosial-politik dalam penetapan penerima. Kondisi tersebut memicu exclusion error dan inclusion error, menimbulkan kecemburuan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perbaikan tata kelola melalui pemutakhiran data, peningkatan kapasitas aparatur, transparansi distribusi, dan pengawasan masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan Bansos lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Ketidaktepatan Sasaran, DTKS, Kota Medan.

ABSTRACT

Social Assistance (Bansos) is a government program aimed at providing economic protection for poor and vulnerable households. However, its implementation in Medan City still faces issues related to mistargeting of beneficiaries. This study analyzes the factors contributing to the mistargeting of social assistance distribution using a descriptive qualitative method through a literature review of scientific journals, government reports, and credible news sources. The results indicate that mistargeting occurs mainly due to inaccuracies in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), weak factual verification at the village level, limited public transparency, and political or social interests affecting beneficiary determination. These conditions lead to exclusion and inclusion errors, trigger social jealousy, and reduce public trust in local government. Improving data management, enhancing staff capacity, strengthening transparency, and increasing community monitoring are essential efforts to ensure that social assistance is more accurately targeted in the future.

Keywords: Social Assistance, Targeting Inaccuracy, DTKS, Medan City.

PENDAHULUAN

Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu pilar strategis dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, menciptakan stabilitas sosial, dan menjaga kesejahteraan

masyarakat rentan. Melalui berbagai skema bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan tunai, dan bantuan daerah, pemerintah berupaya memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasinya di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran (mis-targeting) masih menjadi problem utama dalam pelaksanaan Bansos di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kota Medan.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran umumnya berakar pada lemahnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis utama penentuan penerima bantuan. BRIN (2023) serta Martha & Prakoso (2023) menegaskan bahwa DTKS sering tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terbaru karena pemutakhiran data yang tidak konsisten dan kurangnya verifikasi faktual. Akibatnya, banyak rumah tangga miskin tidak terdaftar sebagai penerima, sementara rumah tangga mampu masih tercantum sebagai penerima bantuan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan aparatur kelurahan dalam melakukan verifikasi, serta kurangnya sistem pengelolaan data yang transparan dan akuntabel.

Di luar persoalan teknis, faktor sosial dan kelembagaan juga sangat memengaruhi efektivitas penyaluran Bansos. Ramadhan (2022) menyoroti bahwa verifikasi lapangan sering dilakukan secara administratif tanpa observasi langsung sehingga banyak informasi tidak sesuai kenyataan. Sementara itu, Wibowo (2020) dan Lestari (2021) menekankan bahwa kurangnya transparansi proses penetapan penerima menimbulkan peluang munculnya praktik nepotisme, titipan nama, dan kepentingan politik lokal, terutama menjelang kontestasi pemilu. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi Bansos bukan hanya persoalan teknis, namun terkait erat dengan tata kelola pemerintahan (good governance).

Fenomena tersebut juga tampak jelas di Kota Medan. Ananda (2024) melalui analisis data penerima Bansos dengan metode association rule menemukan ketidaksesuaian antara distribusi bantuan dan profil kemiskinan masyarakat. Warunayama (2023) juga menegaskan bahwa tata kelola Bansos di Kota Medan masih menghadapi masalah keadilan sosial dan transparansi. Hasil mini riset lapangan yang kelompok kami lakukan menunjukkan kasus serupa: verifikasi lapangan yang minim, proses pendataan yang tidak jelas, serta daftar penerima bantuan yang tidak pernah diumumkan secara terbuka. Dalam beberapa kasus muncul dugaan intervensi kepentingan sosial-politik dan ketimpangan distribusi antar-kelurahan yang menciptakan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan adanya masalah implementasi kebijakan yang serius. Menurut teori implementasi Van Meter & Van Horn, kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel kunci, yaitu standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial-politik lingkungan. Jika salah satu aspek tersebut lemah, maka kebijakan berisiko gagal memenuhi tujuannya, sebagaimana terjadi pada penyaluran Bansos di Kota Medan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi Bansos di Kota Medan dan menjelaskan bagaimana ketidaktepatan sasaran terjadi, faktor apa saja yang melatarbelakanginya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan studi literatur yang diperkuat dengan temuan mini riset lapangan. Penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan agar penyaluran Bansos dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel serta memperkuat prinsip good governance dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan literatur mengenai implementasi kebijakan sosial di Indonesia serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas tata kelola program bantuan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai dasar analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber tertulis, bukan melalui data statistik. Creswell (2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara komprehensif berdasarkan fakta empiris yang telah didokumentasikan dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini menekankan proses eksploratif terhadap dinamika implementasi kebijakan Bansos daripada pengukuran kuantitatif.

Seluruh data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yakni jurnal ilmiah terindeks Google Scholar, DOAJ, dan ScienceDirect, laporan resmi pemerintah seperti dari Kementerian Sosial dan BRIN, buku akademik, serta artikel berita kredibel yang relevan dengan tema distribusi Bansos, akurasi DTKS, serta implementasi kebijakan. Pemilihan literatur dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih dokumen berdasarkan keterkaitan dan kesesuaianya dengan isu penelitian. Rentang literatur yang dianalisis dibatasi pada tahun 2019–2025 untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat mutakhir dan menggambarkan kondisi terkini pelaksanaan Bansos. Selain itu, mini riset sebelumnya yang disusun oleh peneliti turut digunakan sebagai salah satu referensi sekunder karena memuat rangkuman temuan empiris yang mendukung kajian literatur.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan melalui proses membaca, mengidentifikasi, dan mengelompokkan temuan penelitian terdahulu untuk menemukan pola permasalahan utama terkait ketidaktepatan sasaran Bansos, seperti kelemahan pendataan, verifikasi yang tidak optimal, kurangnya transparansi, hingga pengaruh sosial dan politik lokal. Menurut Krippendorff (2020), analisis isi merupakan metode untuk menarik kesimpulan yang valid dari dokumen tertulis melalui proses kategorisasi yang sistematis. Setelah itu, peneliti melakukan proses sintesis temuan dengan menghubungkannya ke dalam konteks Kota Medan berdasarkan literatur

yang tersedia sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai faktor penyebab ketidaksetepatan sasaran dan tantangan implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penyaluran Bansos di Kota Medan serta menawarkan dasar akademik yang kuat untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan publik pada tingkat daerah.

KAJIAN TEORI

1. Bantuan Sosial (Bansos)

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencegah penurunan kualitas hidup. Bansos dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, barang, maupun layanan sosial, yang dirancang untuk mengurangi dampak kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga rentan. Penelitian nasional menegaskan bahwa efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima (BRIN, 2023; Ananda, 2024). Ketika bantuan tidak diterima oleh kelompok yang seharusnya, maka tujuan kebijakan perlindungan sosial tidak tercapai dan dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Dalam konteks pemerintah daerah, termasuk Kota Medan, pelaksanaan Bansos masih menghadapi sejumlah tantangan seperti pendataan yang tidak akurat, distribusi tidak merata, serta ketergantungan pada data lama yang tidak diperbarui secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran Bansos bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga terkait erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

2. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran (*targeting accuracy*) merupakan aspek kunci dalam keberhasilan program Bansos. Sebuah kebijakan dikatakan tepat sasaran apabila penerimanya benar-benar mewakili kelompok miskin dan rentan sesuai kriteria yang ditetapkan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tingkat kesalahan sasaran (*mis-targeting*) yang cukup tinggi. BRIN (2023) mencatat adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial ekonomi masyarakat dengan data DTKS, sehingga banyak warga miskin tidak memperoleh bantuan (*exclusion error*), sementara masyarakat mampu justru terdata sebagai penerima (*inclusion error*).

Di Kota Medan, Ananda (2024) melalui metode *association rule* menemukan ketidaksesuaian pola distribusi bansos dengan profil kemiskinan daerah. Penelitian Sari & Lubis (2022) di Kecamatan Medan Area juga mengungkap bahwa pemutakhiran data jarang dilakukan dan sangat bergantung pada mekanisme kelurahan yang tidak konsisten.

3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS merupakan basis utama dalam penetapan penerima Bansos. Namun, Martha & Prakoso (2023) mengungkapkan bahwa kelemahan utama DTKS terletak pada ketidakterbaruan data dan ketergantungan pada proses administrasi lokal yang tidak seragam antarwilayah. Hidayat (2024) menemukan bahwa kesalahan input, kurangnya

verifikasi faktual, dan keterbatasan kapasitas aparatur daerah menjadi sumber kesalahan pendataan. Pada banyak kasus, verifikasi hanya berbasis dokumen tanpa observasi lapangan, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak tercatat.

4. Implementasi Kebijakan (Model Van Meter & Van Horn)

Model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarinstansi, karakter dan sikap pelaksana, serta kondisi sosial-politik. Penelitian Ramadhan (2022) dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa kegagalan penyaluran Bansos di Indonesia banyak dipengaruhi lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas aparatur kelurahan, dan pemahaman prosedur yang tidak seragam.

Dalam konteks Kota Medan, penelitian dan laporan lokal menunjukkan bahwa pelaksanaan Bansos tidak hanya terkendala secara teknis tetapi juga terdampak oleh dinamika sosial-politik seperti titipan nama, intervensi kelompok tertentu, dan kepentingan politik menjelang pemilu. Mini riset kelompok memperkuat temuan tersebut dengan melaporkan adanya dugaan intervensi aparatur desa atau kelurahan dalam penentuan penerima bantuan.

5. Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bansos

Good governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. UNDP (2020) menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam pengawasan Bansos. Namun, dalam praktiknya banyak kelurahan tidak membuka daftar penerima bantuan kepada masyarakat. Penelitian Lestari (2021) dan Sembiring (2025) menunjukkan bahwa ketika transparansi rendah, peluang terjadinya penyimpangan seperti nepotisme, titipan nama, dan manipulasi data semakin besar.

6. Dampak Sosial Ketidaktepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Lestari (2021) menyatakan bahwa masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan mengalami tekanan psikologis, menurunnya ketahanan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, penerimaan bantuan oleh warga mampu memicu kecemburuhan sosial dan potensi konflik antarwarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Medan merupakan isu krusial yang berpengaruh terhadap efektivitas program perlindungan sosial pemerintah. Berdasarkan kajian literatur, studi empiris, serta data sekunder mengenai kemiskinan dan program bantuan di Kota Medan, ditemukan bahwa ketidaktepatan sasaran dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti kelemahan pendataan, implementasi kebijakan yang belum optimal, rendahnya transparansi publik, serta intervensi sosial-politik pada tingkat lokal.

1. Kondisi Kemiskinan dan Penyaluran Bansos di Kota Medan

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Medan menurun dari 7,94% pada tahun 2024 menjadi 7,25% pada tahun 2025. Secara populasi, jumlah penduduk miskin menurun dari sekitar 187,04 ribu jiwa menjadi 171,60 ribu jiwa. Penurunan ini dapat dijadikan indikator bahwa program perlindungan sosial berpotensi memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Tabel 1. Data Kemiskinan Kota Medan 2024–2025

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Perkiraan Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2024	7,94%	± 187,04
2025	7,25%	± 171,60

Sumber: BPS Kota Medan (2024–2025)

Selain itu, untuk program Bantuan Pangan / BPNT, Kota Medan memiliki sekitar 277.190 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 281.977 KPM, dengan total anggaran realisasi sekitar Rp 166,31 miliar. Pada tahun 2024, pemerintah daerah juga melaksanakan program pendukung berupa pelatihan dengan sasaran 500 KPM di 4 kecamatan, yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi. Meskipun terdapat tren penurunan angka kemiskinan, kesenjangan antara jumlah KPM dan estimasi jumlah rumah tangga miskin mengindikasikan masih adanya *undercoverage*, sehingga tidak semua penduduk miskin menerima bantuan.

2. Kelemahan Akurasi Data DTKS sebagai Penyebab Utama Ketidaktepatan Sasaran

DTKS merupakan sumber utama penentuan kelayakan penerima Bansos. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa akurasi DTKS masih bermasalah karena pemutakhiran data tidak dilakukan secara konsisten dan bergantung pada pelaporan manual tingkat kelurahan. Penelitian BRIN (2023) dan Martha & Prakoso (2023) mengidentifikasi tingginya tingkat *exclusion error* dan *inclusion error* akibat prosedur pembaruan data yang belum mampu mengikuti dinamika sosial ekonomi warga.

Penelitian Ananda (2024) yang menganalisis distribusi Bansos di Kota Medan menggunakan *association rule mining* juga menemukan bahwa penyaluran bantuan tidak selaras dengan peta kemiskinan aktual. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis data historis tidak lagi relevan jika tidak diikuti pemutakhiran data real-time.

3. Implementasi Kebijakan yang Belum Efektif pada Tingkat Lokal

Teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana dalam keberhasilan program. Namun penelitian Ramadhan (2022) dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa aparatur pelaksana di daerah sering tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai dan belum memahami prosedur penilaian kelayakan secara komprehensif. Di Kota Medan, verifikasi lapangan sering digantikan oleh pemeriksaan dokumen administratif, sehingga kelayakan dinilai berdasarkan berkas, bukan kondisi ekonomi riil. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab utama ketidaktepatan sasaran karena proses seleksi penerima tidak dilakukan secara objektif dan berlapis.

4. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Menurut penelitian Lestari (2021) dan Sembiring (2025), daftar penerima Bansos di banyak daerah termasuk Kota Medan tidak dipublikasikan secara terbuka. Kurangnya akses informasi publik membuka ruang terjadinya praktik nepotisme, penyisipan nama, dan penyalahgunaan kewenangan. UNDP (2020) menegaskan bahwa *transparency, accountability, and public participation* adalah unsur pokok dalam *good governance*. Tanpa keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat menjadi terbatas dan peluang manipulasi data penerima semakin besar.

5. Pengaruh Dinamika Sosial dan Politik

Beberapa penelitian juga ditemukan bahwa penyaluran Bansos berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik menjelang pemilihan umum. Ramadhan (2022) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam beberapa kasus dipakai sebagai alat konsolidasi suara untuk menarik dukungan politik tertentu. Intervensi politik semacam ini mengganggu integritas kebijakan dan memperkuat persepsi bahwa Bansos diperalat sebagai komoditas politik, bukan instrumen keadilan sosial.

6. Dampak Sosial dari Ketidaktepatan Sasaran Bansos

Kesalahan sasaran dalam penyaluran Bansos memiliki implikasi sosial yang signifikan. Lestari (2021) menemukan bahwa masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan mengalami tekanan emosional, rasa ketidakadilan, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pemberian bantuan kepada warga mampu menimbulkan kecemburuhan sosial dan memicu konflik horizontal. Kondisi ini memperlemah kohesi sosial dan menurunkan legitimasi program pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Medan merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh kelemahan sistem pendataan, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, minimnya transparansi publik, serta adanya intervensi sosial-politik dalam proses penetapan penerima bantuan. Ketergantungan pada DTKS yang tidak diperbarui secara berkala, serta mekanisme verifikasi yang lebih menekankan pada aspek administratif dibandingkan observasi lapangan, menyebabkan terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error*, di mana rumah tangga miskin tidak memperoleh bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka, sementara sebagian warga mampu tetap tercatat sebagai penerima. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendistribusian bantuan memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan dan praktik nepotisme, sehingga menimbulkan kecemburuhan sosial, konflik antarwarga, dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya perbaikan tata kelola penyaluran Bansos secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan perlu melakukan pemutakhiran DTKS secara rutin dengan memadukan data administrasi dan verifikasi faktual di lapangan untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan. Penguatan kapasitas

aparatur melalui pelatihan teknis dan penerapan standar verifikasi yang baku sangat penting untuk memastikan proses penilaian kelayakan lebih objektif dan profesional. Transparansi publik harus diwujudkan melalui publikasi terbuka daftar penerima Bansos pada papan informasi kelurahan, situs web resmi, atau aplikasi digital agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial. Pemerintah juga perlu menyediakan sistem pengaduan dan koreksi data yang mudah diakses untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam mengawasi penyaluran bantuan. Selain itu, penyaluran Bansos harus dijaga dari intervensi kepentingan politik dengan mempertegas regulasi dan sanksi terkait penyalahgunaan kewenangan. Pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis data real time juga direkomendasikan guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendistribusian bantuan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kota Medan dapat menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, P. & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *JUPIN: Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1399–1410.
- Dwiarto, R. (2023). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemanfaatan Aplikasi “Cek Bansos”. Prosiding/universitas terkait.
- Prosiding Unimus
- Indawati, R. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak COVID-19 di Indonesia. MAPAN, [volume/issue], hlm. 83–[akhir].
- Putri, R. & Riofita, H. (2025). Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 7(2).
- Salsabila, N. W., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Sembiring, F. F. Br & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Terhadap Bantuan Sosial bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(5), 6779–6790.
- Rahmansyah, W. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal PKNSTAN / Publikasi PKNSTAN*, [detail volume/issue].

- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 6(3), 3580–3592.
- Halizatunnisa, S. S., Safitri, R., Asysyabani, Q. H., Rahma, F., & banyak penulis lainnya. (2025). Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(4), 379–390.
- Bitvonline. (2025, Juli 31). Pemko Medan Ditegur Soal Bansos Tak Tepat Sesaran, Ini Penjelasan Dinas Sosial. Retrieved from Bitvonline:
- Dyah Purbaningrum, H. H. (2024). TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK: MENYIASATI KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PRINGSURAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 15; No. 02.
- Erfina, I. Y. (2025, November Rabu, 5). Bansos Tak Tepat Sasaran? Ini Jawaban Resmi Kemensos dan Solusi Perbaikan Data Penerima 2025. Retrieved from Radar Bogor: <https://radarbogor.jawapos.com/nasional/2476247712/bansos-tak-tepat-sasaran-inijawaban-resmi-kemensos-dan-solusi-perbaikan-data-penerima-2025>
- Herlinawati, H. (2025). Ketidakmerataan Penyaluran Bantuan Sosial di RT 013 Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 12–23. Retrieved from